

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink Groningen, 1974.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asikin, Zainal., *Hukum Kepailitan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2020.
- Atmoko, Dwi & Hutagalung, Jantara Mauli., *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2022.
- Bernard. L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Christiawan, Rio., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2020.
- Ginting, Elyta Ras., *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Harahap, M. Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Cet. 7. Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Machmudin, Dudu Duswara., *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Mamudji, Sri., at. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Nating, Imran., *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi., *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Prakte Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, 2018.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian dan Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R. Subekti., *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.

- Rudhy A. Lontoh., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rusli, Tami., *Hukum Kepailitan di Indonesia*, UBL Press, Lampung, 2019.
- Sarwono., *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sjahdeni, Sutan Remy., *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Ctk. Kedua, Ed. Revisi*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- _____.*, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Siti Anisah., *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Total Media., 2008.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010.
- Subhan, M. Hadi., *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2021.
- Supramono, Gatot., *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Syahrani, Riduan., *Hukum Acara Peradilan Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. 1.*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Waluyo, Bernadette., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN.Jkt.Pus.

Jurnal Ilmiah

Afriana, A., dan Mantili, R., Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. Jurnal Ilmiah DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol 2, (No. 2), p. 219-233. 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1301>.

Cahyono, dkk., "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)", Lex Patrimonium: Vol. 2: Iss. 2, Article 11. 2023.

Harsono, Ivan dan Praningtyas, Paramita., Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Pada KAsus Kepailitan PT Njonja Meneer, NOTARIUS, Vol. 12, No. 2, 2019.

Karaar, Amar Tegar & Yunanto. Kepailitan Akibat Pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Oleh Kreditor Separatis. NOTARIUS, Vol. 17. No. 2. 2024. 1215-1231.

Marinka, L., & Suryono, A. Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Terbentuknya OJK : (Studi Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 11. 2024. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2255>.

- Rifani, Ratu Alawiyyah, dkk., Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Mencegah Kepailitan (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *JURISDICTIONE*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rohendi, Acep., Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur dengan Para Kreditur, *SELISIK*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Simalango, Maruli., Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia, *Syiar Hukum*, 21, 2144-2156. 2024.
- Siti Mahmudah, dkk., Mekanisme Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Utang Menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1-11. 2013. <https://doi.org/10.14710/dlj.2013.388>.
- Sofia, Arijna Nurin., Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Vol. 3 No. 4, *Jurist-Diction*, 2020. DOI:10.20473/jd.v3i4.20213.
- Sutiyono, Bambang., Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum*, No. 26 Vo. 11, 2004.
- Yedija, Ignwer Toynbee. Eksistensi Perdamaian Dalam Kepailitan Terkait Akibat Pembatalan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Dan Pembayaran Utang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol, 4, No. 4, 12347-12358. 2024.

Laporan Penelitian, Skripsi, Thesis, Disertasi

- Kusmiati, Mia. *Pengaruh Profitabilitas Dan Tingkat Pertumbuhan Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk)*. Thesis. Universitas Siliwangi. 2019. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/1022>
- Rosaria, Debora., *Tinjauan Hukum Mengenai Perdamaian dalam Kepailitan Studi Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT IGLAS (Persero) (Putusan No. 397 K/Pdt.Sus/2009 Jo. No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga. Sby)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Media Online

- KBBI, tersedia pada <https://kbbi.web.id/pailit>, diakses tanggal 25 November 2024.

_____, tersedia dalam <https://kbbi.web.id/solven>, diakses pada 12 Februari 2025.

<https://www.kamusbesar.com/grace-period>, diakses pada 12 Februari 2025.

Dedy Kurniadi & Co Lawyers, 7 Juli 2023, *Beberapa Ketentuan Terkait Kepailitan dan PKPU dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan "UU PPSK"*, tersedia pada <https://dedykurniadi.com/beberapa-ketentuan-terkait-kepailitan-dan-pkpu-dalam-undang-undang-no-4-tahun-2023-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-uu-ppsk.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024.

Pangaribuan, Ribka Arthauli., *Kewenangan OJK dalam Mengajukan Permohonan Pailit Sebelum dan Sesudah UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan di sektor Keuangan*, Universitas Indonesia Library, 2023, tersedia pada <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920530127&lokasi=lokal>, diakses pada 3 Januari 2025.

Trisnawati, Putri Ayu., *Perbedaan rencana Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU*, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, 2019, tersedia pada <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-rencana-perdamaian-dalam-kepailitan-dan-pkpu/> diakses pada 29 November 2024.

